

**STRATEGI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI
NELAYAN TRADISIONAL DI KECAMATAN NIPAH PANJANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)**



**Oleh:
ARIF NOFRIANTO
NIM: 105170400**

**Pembimbing :
Dr. Irmawati Sagala, S.IP, M.Si, MSHS
Wenny Dastina, S.Sos, M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2022/1442H**

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1) Di Fakultas Syariah UIN STS JAMBI.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hasil terbukti bahwa karya ini terbukti bahwa karya ini bukan hasil saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.



Jambi, Juni 2022

Arif Nofrianto
105170400

Pembimbing I : Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si
Pembimbing II : Wenny Dastina, S.Sos, M.Si
Alamat : Fakultas Syari'ah UIN SUTHA Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian Km. 16 Simp.Sungai Duren
Jaluko Kab. Muara Jambi 31346 Telp (0741) 582021

Jambi, Juni 2022

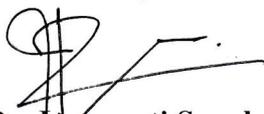
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Di_
Muaro Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamualaikum wr wb. Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa bahwa skripsi saudara: **Arif Nofrianto NIM.105170400** yang berjudul "**Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Tradisional di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi**" Telah disetujui untuk dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I



Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si
NIP.198010012009092009

Pembimbing II



Wenny Dastina, S.Sos, M.Si
NIP.197801092005012006



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Strategi Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Tradisional Di Kecamatan Nipah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Panjang Provinsi Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 25 oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Oktober 2022



Ag., M.H
NIP/2007020022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. Ishaq, SH, M.Hum
NIP. 196312181994031001

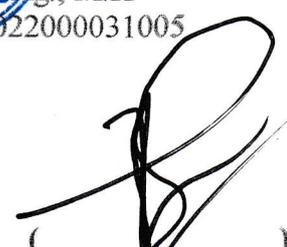
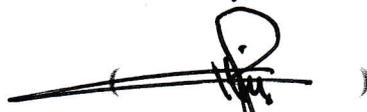
Sekretaris Sidang : Dra. Choiriyah
NIP. 196605081994032001

Penguji I : Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004

Penguji II : Sigit Hartono S.Pd, MA
NIDN. 2018038303

Pembimbing I : Dr. Irmawati Sagala, S.IP, M.Si
NIP. 198010012009012009

Pembimbing II : Wenny Dastina, S.Sos., M.Si
NIP. 197801092005012006

()
()
()
()
()
()

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Qur'an Surah Annisa Ayat 58).



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya kecilku ini sebagai salah satu tanda bakti keseriusanku dalam menuntut ilmu

Kepada :

Kedua orang tua tercinta Bapak Wasis dan Ibu Sulastri yang selma ini senantiasa tulus mendoakan keberhasilanku, serta telah banyak memberikan dukungan baik dari segi moral ataupun materil untukku dalam menuntut ilmu, tidak ada kata seindah puisi yang mampu lagi kuucapkan selain ribuan kata terima kasih atas semua pengorbanan yang telah kalian berikan, tidak ada yang dapat ananda berikan sebagai bukti selain karya kecilku ini, Insyaallah ALLAH SWT yang akan membalas semua keikhlasanmu, kebaikanmu dalam bentuk pahala di hadapan-Nya. Aamiin aamiin ya Robbal alaamiin

ABSTRAK

Nama : Arif Nofrianto
NIM : 105170400
Judul : Strategi Dinas Kelautan Perikanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Tradisional Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

ABSTRAK: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan di Kecamatan Nipah Panjang adalah dengan cara memberikan bantuan dan fasilitas alat tangkap, edukasi dan penyuluhan serta asuransi kecelakaan kerja serta memberikan pembinaan cara pengolahan hasil perikanan dan kelautan kepada nelayan agar menjadikan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber pendapatan yang bernilai ekonomis sehingga nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik sebagaimana Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kata Kunci: *Strategi, Kesejahteraan, Nelayan Tradisional.*

ABSTRACT

Name : Arif Nofrianto
Nim : 105170400
Title : *The Strategy Of The Marine and Fisheries Departement Of Tanjung Jabung Timur District In Improving the Economic Welfare Of Traditional Fisherman*

ABSTRACT: This thesis aims to find out how the strategy of the Department of Marine Affairs and Fisheries in Tanjung Jabung Timur district in improving the economic welfare of traditional fishermen in the district of Nipah Panjang. This thesis uses a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews and documentation. Data analysis in this study uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the research conducted, it can be concluded that the strategy of the Department of Marine Affairs and Fisheries of Tanjung Jabung Timur Regency in improving the economic welfare of fishermen in the Nipah Panjang sub-district is by providing assistance and facilities for fishing gear, education and counseling as well as occupational accident insurance as well as providing guidance on processing fishery products and marine services to fishermen in order to make marine and fishery potential a source of income that has economic value so that later it can improve the standard of living and the economy of the community for the better as the Vision of the Department of Marine Affairs and Fisheries of East Tanjung Jabung Regency.

Keywords: *Strategy, Welfare, Traditional Fishermen.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Dinas Kelautan Perikanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Tradisional Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”**. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau dapat merasakan indahny hidup seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana program Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Walaupun demikian penulis berusaha semaksimal mungkin agar inti dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dikemudian hari.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asy'ary, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Agus Salim, S.Th., MA., M.IR., Ph.D. selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Syari'ah, Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dibidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan Syari'ah, Dr. Ishaq, SH., M.Hum, selaku pembantu Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Bapak Yudi Armansyah, M. Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Juharmen, S.HI., M.HI selaku pembimbing Akademik yang telah membantu segala urusan di Jurusan
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si. selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Wenny Dastina, S.Sos, M.Si selaku pembimbing skripsi II Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selama ini telah membantu segala urusan di jurusan dan banyak membantu penulis dalam rangka memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Semua pihak yang telah membantu Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Terima kasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan penulis hanya bisa berdoa dan berikhtiar karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan untuk semua.

Penulis



Arif Nofianto

Nim : 105170400

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERTANYAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
G. Jadwal Penelitian	14
H. Tinjauan Pustaka.....	14
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Otonomi Daerah.....	16
B. Pelayanan Publik.....	19
C. Kebijakan Publik.....	22
D. Definisi Operasional	25
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan.....	26
1. Lokasi	26
2. Visi dan Misi	26
3. Tugas dan Fungsi	27
4. Struktur Organisasi.....	28
5. Sumberdaya Manusia	29
B. Profil Kecamatan Nipah Panjang.....	30
1. Aspek Geografis.....	30
2. Aspek Demografis.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Dinas Perikanan dan Kealutan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Tradisional di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	36
B. Kendala Yang Dihadapi Dinas Perikanan dan Kealutan dalam Mengatasi Permasalahan Ekonomi Nelayan Tradisional	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rancangan Informan	11
Tabel 2 Identitas Dinas Kelautan dan Perikanan	26
Tabel 3 Tugas Pokok dan Wewenang Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	27
Tabel 4 Fungsi Dinas Perikanan	27
Tabel 5 Luas Desa/Kelurahan Dan Persentasenya	30
Tabel 6 Letak Desa atau Kelurahan Berdasarkan Kondisi Geografis.....	31
Tabel 7 Jumlah Penduduk dan Kepadatannya	32
Tabel 8 Rincian Bangunan Pendidikan	33
Tabel 9 Daftar Penerima Bantuan Khusus Nelayan Kecamatan Nipah Panjang	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bantuan Perahu Nadi.....	38
Gambar 4.2 Alat Tangkap Jaring	43
Gambar 4.3 Pelatihan Ibu-ibu Nelayan.....	45
Gambar 4.4 Sosialisasi dan Pembinaan Nelayan	47
Gambar 4.5 Kartu Asuransi Nelayan	48
Gambar 4.6 Bantuan Rumah Subsidi	51

DAFTAR SINGKATAN

DKP	: Dinas Kelautan dan Perikanan
RPJMD	: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
PERMEN	: Peraturan Menteri
PPI	: Pangkalan Pendaratan Ikan
KABAG	: Kepala Bagian
KASUBBAG	: Kepala Sub Bagian
KASI	: Kepala Seksi
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sispil
PHTT	: Pegawai Honoror Tidak Tetap
PDSPP	: Penguatan Dan Daya Saing Produk Perikanan
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PR	: Pekerjaan Rumah
SK	: Surat Keputusan
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
MENDAGRI	: Menteri Dalam Negeri
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, Pembudidaya ikan, dan petambak garam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa *“Perlindungan Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman”*. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat 2 bahwa *“Pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam untuk melaksanakan usaha perikanan atau usaha pergaraman secara lebih baik”*.¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2016 pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah menjamin kestabilan ekonomi dan perlindungan masyarakat nelayan tradisional dan memberikan penyelesaian atas permasalahan yang di hadapi oleh nelayan.

Indonesia adalah negara maritim dengan luas perairan mencapai 3,25 juta km² atau sekitar 63 persen wilayah Indonesia. Manusia hendaknya mampu menjaga, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya laut dengan sebaik-baiknya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat *An-Nahl ayat 16 Dan Dia-lah, Allah yang telah menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan darilautan itu*

¹Undang-undang RI No 7 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 dan 2.

perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, supaya kamu bersyukur.²

Rata-rata pendapatan nelayan dari hasil tangkapan di laut diasumsikan potensi telah dimanfaatkan sebagian hanya sebesar Rp 28,08 juta/tahun, lebih kecil dibandingkan pendapatan pembudidaya ikan di perairan umum dan di tambak yang mencapai Rp 34,80 juta/tahun dan Rp 31,32 juta/tahun. Namun, pendapatan nelayan yang menangkap ikan di laut lebih baik dibandingkan pendapatan pembudidaya ikan di laut yang hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 24,39 juta/tahun.³ Pendapatan rata-rata yang rendah tersebut menyebabkan nelayan dan pembudidaya ikan menjadi miskin dan terbatas memenuhi kebutuhan hidupnya.

Nelayan, menurut Undang-Undang RI No 7 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan yang dimaksud dengan nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.⁴

Keadaan sosial ekonomi masyarakat pembudidaya ikan di Indonesia bisa dikatakan hampir sama nasibnya dengan nelayan di wilayah pesisir pantai di Indonesia. Kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan umumnya masih berada dalam pola-pola kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi, karena kesulitan hidup yang dihadapi nelayan dan pembudidaya juga keluarganya. Sumber pendapatan nelayan tidak hanya dihasilkan melalui sumberdaya perikanan tetapi melakukan usaha-usaha budidaya ikan di tambak, dan pengolahan ikan tradisional. Kegiatan

²Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-karim dan terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.

⁴Undang-Undang No 7 tahun 2016 Pasal 1 ayat 5.

pembudidayaan ikan dan pengembangannya dilakukan nelayan karena hasil yang didapat dari melaut belum mencukupi kebutuhan kehidupan mereka.⁵

Pembudidaya ikan ada yang berasal dari nelayan tangkap dan melakukan pembudidayaan ikan pada saat tertentu (biasanya pada saat musim tidak dapat melaut). Namun, ada juga pembudidaya ikan yang menggantungkan penghasilannya semata-mata dari berbudi daya ikan. Pembudidaya ikan juga rentan terhadap permasalahan yang dapat mengakibatkan kemiskinan, mulai dari minimnya luas lahan tambak, kurangnya permodalan, tatacara pembudidayaan yang kurang baik, sampai dengan kesulitan mengolah dan memasarkan hasil budidaya perikanan.

Dalam hal ini pemerintah Provinsi, Kabupaten ataupun Kecamatan khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai beberapa tugas berat dalam upaya meningkatkan potensi hasil lautnya, karena setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap ikan hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seinen net*) secara tidak langsung hal ini akan membuat banyak nelayan yang akan mengeluh,⁶ dan sebelum dikeluarkannya PERMEN No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawl*) dan Pukat tarik (*seinen nets*) pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Kecamatan Nipah Panjng sebenarnya telah mempunyai kendala dan masalah yang belum terselesaikan salah satunya yaitu belum optimalnya pangkalan pendaratan ikan (PPI) yaang dibuat dikarenakan

⁵Helmi Alfian dan Satria Arif. *Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis*. Makara , Sosial Humaniora, Vol 16, No 1, 2012. Hlm. 6.

⁶Peraturan Menteri No 2 tahun 2015 *Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawl) dan Pukat tarik (seinen nets.)*

banyaknya nelayan yang tidak mau menurunkan hasil tangkapannya ditempat yang sudah disediakan oleh pemerintah tersebut.⁷

Nipah Panjang merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Nama Nipah Panjang berasal dari Pohon Nipah suatu jenis tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah pesisir pantai tanjung dan sungai-sungai yang ada. Adapun daun nipah yang sangat lebat inilah yang menyebabkan etnis Melayu yang notabene nya adalah penduduk asli daerah tersebut menyematkan nama Nipah Panjang. Mayoritas penduduknya adalah etnis Banjar, Bugis, Melayu, Jawa, Minang, dan Cina. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan nelayan. Secara geografis Kecamatan Nipah Panjang merupakan daerah pesisir pantai, oleh karena itu mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sebagaimana seperti yang telah disampaikan oleh bapak Poniran selaku staf PPM (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) beliau mengatakan bahwa “*Ada sekitar kurang lebih 600 nelayan aktif, yang terbagi dua kategori nelayan yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Jumlah nelayan tradisional adalah 450 orang, dan nelayan modern sebanyak 150 orang*”.⁸

Mayoritas penduduknya adalah nelayan tradisional karena alat yang digunakan untuk menangkap ikan masih manual dan cenderung tradisional, seperti jala, jaring, belat, togok, perahu dayung, pancing, bubu dan alat tradisional lainnya dan ikan yang didapat juga hanya ikan-ikan sungai saja seperti ikan lais, ikan semilang, ikan patin, mata merah, udang nenek, kerang dara, kepiting bakau dan

⁷Observasi dan wawancara dengan Bapak Bujang selaku Kepala PPI Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten tanjung Jabung Timur, 26-27 november 2021.

⁸Wawancara dengan Bapak Poniran selaku staf PPM di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021.

ikan-ikan sungai lain nya . Hal ini berbanding terbalik dengan nelayan modern, yang secara umum alat tangkap ikan yang mereka gunakan lebih maju dan modern, seperti kapal yang lebih canggih dan dilengkapi dengan sistem navigasi, dengan alat tangkap berupa *Bream Trawl*, *satelit navigasi system*, *fish finder*, sonar penangkap ikan dan alat modern lainnya. Hal ini jelas lebih mempengaruhi hasil tangkapan yang didapatkan, karena dari segi alat tangkap yang di gunakan sudah jelas lebih unggul nelayan modern dibandingkan dengan nelayan tradisional sehingga nelayan modern mampu mendapatkan ikan laut yang lebih bernilai ekonomis seperti ikan tongkol, ikan kakap, ikan tenggiri, ikan pari, bahkan ikan tuna.

Dari uraian diatas sudah jelas terlihat bahwa kondisi ekonomi nelayan tradisional masih jauh tertinggal dari nelayan modern, hal ini dipengaruhi oleh alat tangkap yang digunakan sehingga hasil tangkapan nelayan tradisional lebih sedikit dibandingkan nelayan modern. Hal tersebut berbanding lurus dengan yang di sampaikan oleh ibu Ayu, beliau mengatakan bahwa “*penghasilan yang di peroleh suaminya minimum 1-2 juta rupiah dalam 2 sampai 3 kali melaut, sedangkan nelayan modern mampu memperoleh keuntungan 6-7 juta rupiah dalam 2-3 kali melaut*”.⁹

Setiap kelompok masyarakat, baik itu nelayan atau pembudidaya perikanan memerlukan penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok usaha dan aktivitas ekonomi mereka. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut menunjukkan keanekaragaman pola perlindungan dan pemberdayaan yang akan

⁹Wawancara dengan ibu Ayu selaku istri salah satu nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten tanjung Jabung Timur tahun 2021.

diterapkan untuk setiap kelompok tersebut. Keberhasilan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan harus dirancang sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok masyarakat nelayan serta pembudidaya ikan dengan kelompok masyarakat lainnya.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat dalam upaya meningkatkan ekonomi nelayan tradisional yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Hal ini terlihat jelas pada kondisi dan keadaan yang ada di daerah tersebut bahwa kondisi ekonomi masyarakat nelayan tradisional masih sangat sederhana.

Nelayan tradisional yang masih menggunakan alat tangkap yang sederhana seperti perahu dayung (sampan), jaring, pancing, belat dan bubu. Sedangkan nelayan modern sudah menggunakan alat tangkap yang modern pula seperti kapal motor yang skalanya lebih besar, trool, jaring dan scope nya lebih luas yaitu di laut lepas. Hal inilah yang membuat perbedaan pendapatan dari nelayan tersebut, berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Razali selaku nelayan tradisional setempat beliau mengatakan bahwa dalam kurun waktu satu bulan dalam kondisi cuaca bagus mungkin pendapatan dari nelayan tradisional kurang dari 2 juta rupiah, sedangkan pendapatan nelayan modern dalam kurun waktu satu bulan mencapai 5 juta bahkan bisa lebih. Hal ini dihitung ketika cuaca bagus, jika cuaca dan air laut sedang tinggi nelayan tradisional bahkan hanya bisa mendapatkan hasil Rp 75.000/orang perhari.¹⁰

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam

¹⁰Wawancara dengan Bapak Razali Selaku nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang

bentuk skripsi dengan judul **“Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Tradisional di Kecamatan Nipah Panjang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian batasan masalah yang telah penulis paparkan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pembinaan nelayan tradisional?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan maka untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas, yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten, maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas mengenai Strategi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Tradisional pada tahun 2019 hingga sekarang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui strategi Dinas Perikanan dan Kelautan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan pembinaan nelayan tradisional.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai Salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana setrata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Dan hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah /masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan daerah lainnya.
- c. Agar Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Tradisional Di Kecamatan Nipah Panjang dapat dipelajari khalayak umum.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan Perikanan Tanjung Jabung Timur dan di Kecamatan Nipah Panjang Jalan Delta No 45 Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi 36557.

2. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu survei yang menggunakan karakteristik lingkungan alam, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, mengadopsi metode induktif, dan berfokus pada makna. Metode kualitatif



adalah mengumpulkan data mentah secara langsung di tempat, melakukan wawancara mendalam dengan semua partisipan utama dalam proses kebijakan, memverifikasi sumber, dan mengamati langsung interaksi partisipan dalam kehidupan.¹¹

Menurut Patton, definisi paradigma hampir sama dengan Kun, yaitu sebagai pandangan dunia, gambaran, dan cara untuk memecahkan kompleksitas dunia nyata. Paradigma adalah mentalitas seseorang atau sekelompok orang. Menurut pengalaman penelitian, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur statistik atau melalui kuantifikasi.¹²

Menurut Denzim dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kegunaan metode kualitatif pada penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.¹³

3. Jenis dan sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

¹¹ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revial*, Jambi: Syariah press IAIN STS, 2014. Hlm. 251

¹² M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2017, hlm. 25.

¹³ Denzin dan Lincon Moleong. *Handbook Of Qualitative Research*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 5.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak dapat diberikan dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui sumber atau istilah teknis dari orang yang diwawancarai (yaitu, orang yang kita gunakan sebagai target untuk memperoleh informasi). Sasaran/informan penelitian ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan masyarakat nelayan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau beberapa informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan mengutip sumber lain, jadi tidak benar karena diperoleh dari yang kedua, ketiga, dst. Sumber data pelengkap dalam penelitian ini berasal dari dokumen atau kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, buku, majalah dan tulisan, yang mendukung data utama penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Saat mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan:

a. Observasi

Observasi dalam investigasi merupakan alat untuk memperoleh data utama untuk mengevaluasi hubungan birokrasi. Nasution mengatakan bahwa observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat mengolah data, yaitu fakta tentang dunia, dan mengamati pernyataan yang dibuat. Untuk melengkapi metode memperoleh data yang lengkap, penulis menggunakan metode



observasi yang memperoleh data.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung dikantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten terdiri dari pencarian data berbagai fakta yang berkaitan dengan masalah melalui observasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang orang lain untuk tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara terbuka agar yang diwawancarai mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan memahami maksud dan tujuan peneliti yang melakukan wawancara. Selain itu, peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Adapun wawancara ditujukan kepada beberapa informan diantaranya Kadis Kelautan dan Perikanan, Kabid pengolahan dan perikanan tangkap, Kabid Pengembangan potensi perikanan dan kelautan, Kabid Pemberdayaan masyarakat pesisir, kepala Pangkalan pendaratan ikan, dan masyarakat nelayan.

Tabel 1
Rancangan Informan

No	Unsur	Jumlah
1.	Kabid Kelautan dan Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur	1 Orang
2.	Kabid Pengawasan Sumberdaya Perikanan	1 Orang
3.	Seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran	1 Orang

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung, Alfabeta 2009, Hlm. 145

4.	Pengurus Organisasi Paguyuban Nelayan	2 Orang
5.	Nelayan	10 Orang

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik bagi peneliti untuk mengumpulkan data dengan mengumpulkan dokumen dari sumber yang dapat dipercaya. Data yang diperoleh akan berupa gambar, kertas atau dokumen.

5. Tehnik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono, mereka percaya bahwa "kegiatan dalam analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlanjut sampai selesai. Tiga teknik analisis data kualitatif, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berpikir yang membutuhkan kearifan dan keluasan serta kedalaman pengetahuan yang besar. Bagi peneliti baru dapat berdiskusi dengan teman atau orang lain yang menganggap dirinya ahli saat melakukan reduksi data.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah visualisasi data atau visualisasi data dalam penelitian kualitatif. Visualisasi data dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.



c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara. Jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya, maka akan terjadi perubahan.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan tiga teknik untuk mereduksi data yang diperoleh dari wawancara dan kemudian menyalinnya, untuk memudahkan pengorganisasian dan analisis data bagi peneliti.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis telah melakukan studi sistematis untuk kenyamanan pembaca, yang meliputi:

Bab I : Pendahuluan, bab ini pada dasarnya menjadi acuan dan pijakan bagi penulis skripsi. Pada bab ini memuat latar belakang, masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan peneliti, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

Bab II: Metode Penelitian, pada bab ini membahas tentang fokus penelitian yang didalamnya membahas tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistem penulisan dan prosedur penelitian.

Bab III : merupakan gambaran umum lokasi penelitian Bab ini berisi tentang sejarah terbentuknya dan letak Nipah Panjang, visi, misi dan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tugas Pokok dan Fungsi PPM, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sarana dan Prasarana Kecamatan Nipah Panjang. Dan tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Bab IV : Membahas tentang hasil penelitian, termasuk penjelasan isi makalah yang membahas tentang pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi tentang Perlindungan dan hak Nelayan dan penambak ikan.

Bab V : Pada bab ini berisi tentang penutup dan hasil dari penelitian bterdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengnan daftar pustaka, lampiran dan kurikulum vitae. Kesimpulan diambil dari pembuktian dan uraian yang telah tertulis dahulu dan berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Jadwal Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dari segi waktu dan kegiatan. Untuk itu penulis sengaja membuat jadwal penelitian kegiatan yang dilaksanakan dengan 3 tahap yaitu:

Tahap pertama: meliputi kegiatan penyusunan proposal, seminar, instrumen penelitian dan perizinan riset/penelitian.

Tahap kedua: meliputi pengumpulan data lapangan, analisis data dan penyusunan data

Tahap ketiga: meliputi penyusunan skripsi, perbaikan dan penggandaan skripsi.¹⁵

H. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Antonius Rudi Antoko mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung Yang Berjudul “Strategi dan kebijakan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung” penelitian ini Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif menghasilkan strategi dan kebijakan dengan cara merumuskan tiap kombinasi matrik SWOT. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan dan

¹⁵Tri Wahyu. *Tingkat kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik*, Jambi: Skripsi, 2012. Hlm 42.

peluang merupakan sektor unggulan yang dapat dijadikan nilai positif dalam mengembangkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syakir mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. "*Kesejahteraan Sosial Nelayan Tradisional Di Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah*" Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh "*Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Kota Banda Aceh*" (Studi Kasus : Nelayan Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh).

Adapun persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti dan membahas nelayan dan penambak ikan sedangkan perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah, pertama lokasi penelitian, kedua tahun penelitian nya, ketiga fokus kajian yang lebih spesifik yaitu penelitian saya lebih berfokus pada nelayan tradisional nya sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas nelayan secara global.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian dan Tujuan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Undang-undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Menurut Sumaryadi dalam bukunya dijelaskan bahwa otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu terdiri dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.¹⁸ Menurut Halim dalam Erlangga A. Landiyanto ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan suatu otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan

¹⁶Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*

¹⁷Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013, Hlm. 4

¹⁸Sumaryadi, Inyoman. *Otonomi Daerah Khusus dan Birokrasi Pemerintahan..* Jakarta: LMPI, 2006. Hlm. 125.

dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mengelolah pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 dan UU.No 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.¹⁹

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah agar daerah dapat mengatur keluarganya sendiri dan meningkatkan efisiensinya. Kegunaan mengarah pada pengembangan masyarakat dan implementasi layanan. Daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap otonomi daerah memiliki peluang besar untuk pembiayaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Dari beberapa pengertian otonomi daerah diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah adanya kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri daerahnya. Kebebasan atau kewenangan tersebut, merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau secara nasional. Kebebasan atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk kemudahan pemanfaatan potensi lokal dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

¹⁹ Keriahen. “Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sektor-Sektor Berpotensi yang Dapat Dikembangkan di Pemerintah Kota Medan” Universitas Sumatera Utara, Medan. Vol 2, No 3, 2007.

2. Asas-Asas Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah menyatakan bahwa otonomi daerah terbagi atas: a) Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang. penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri, b) Asas dekonsentrasi adalah penyerahan sebagian kewenangan, artinya sebagian urusan dari pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu, dan/atau pada gubernur dan walikota atau bupati sebagai penanggungjawab dari urusan pemerintah umum dan c) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah provinsi. Namun asas-asas tersebut mengalami pasang surut terutama dalam asas desentralisasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 penurunan desentralisasi secara drastis dapat terlihat dari ketentuan Pasal-Pasal yang baru. Pasca desentralisasi, semua keputusan dan kebijakan dilakukan dan diputuskan di masing masing daerah dan yang memutuskan maupun yang membuat kebijakan juga adalah putra daerah, sehingga pembangunan tepat



asaran, kemudian daerah bebas mengeksploitasi hasil alam yang ada sebagai sumber pendapatan asli daerah dan mendapatkan perimbangan dana Pusat.²⁰

B. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya meonolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi publik diartikan sebagai organisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia, yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.²¹

Menurut Mahmudi pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik menurut Sinambela adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang

²⁰Fauziah, Hera. *Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah*. JOM Fakultas Hukum: Vol 3, No 2, 2016. Hlm. 4

²¹ Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Hal: 6

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Moenir pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pelayanan publik merupakan bagian penting dari instansi pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pelayanan dapat diartikan sebagai penyediaan (pelayanan) kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi atau masyarakat menurut aturan dasar dan tata cara yang telah ditentukan. Pelayanan publik adalah salah satu persyaratan dengan premis bahwa mereka memenuhi persyaratan layanan berdasarkan undang-undang dan peraturan merupakan hak dasar setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhannya untuk menerima barang, jasa, dan layanan pemerintah yang disediakan oleh penyedia layanan publik terbesar.²²

Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki kegiatan yang hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

²² Dwiyanto Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2008. Hal: 16

2. Indikator Pelayanan Publik

Menurut Sinambela dalam bukunya dijelaskan bahwa terdapat lima indikator Pelayanan public yaitu: a) *Reliability* yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar, b) *Tangibles* yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, c) *Responsiveness* yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat, d) *Assurance* yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, dan e) *Empaty* yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen²³.

Sedangkan menurut Zaithaml, Parasuraman & Berry menuturkan bahwa terdapat lima indikator pelayanan publik yaitu, *Tangibles, releability, responsiveness, Assurance, dan empathy*. 1) *Tangibles*, yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan, 2) *Reliability, reability* atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat, 3) *Responsivess* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan palayanan secara ikhlas, 4) *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan, dan 5) *Empathy* adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual²⁴.

²³ Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Hal: 7

²⁴ A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard. Berry. *A Conceptual Model of Service Quality and Implication for Future Research*. Journal of Marketing: Vol 49, No 4, 2005. Hal: 26

3. Strategi Peningkat Pelayanan

Strategi merupakan pola keputusan dari alokasi sumber yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kekuatan internal dan eksternal didalam menghadapi setiap perubahan²⁵. Strategi merupakan cara mengantisipasi tantangan-tantangan dan kesempatan (peluang) masa depan pada kondisi lingkungan perusahaan yang berubah dengan cepat. Strategi dapat memberikan tujuan dan arah perusahaan dimasa depan dengan jelas pada semua karyawan. Oleh karena itu, strategi diperlukan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang muncul dari pesaing.²⁶

Menurut Rangkuti strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe yaitu:

a. Strategi manajemen

Meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro seperti strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.

b. Strategi investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi, dan sebagainya.

c. Strategi bisnis

Strategi ini sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran,

²⁵Rochaety, *Manajemen Strategi*. Bandung : Alfabeta, 2005, Hlm 78.

²⁶Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 1998. Hlm. 203.

strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi yang berhubungan dengan keuangan.²⁷

C. Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari kata bijak yaitu mahir atau pandai sedangkan kebijakan adalah kemahiran, kepandaian dan kebijaksanaan. Secara umum istilah kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor misalnya atau sejumlah faktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.²⁸ Perbedaan makna kebijaksanaan dan kebijakan tidaklah menjadi persoalan selama diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif dan bersifat umum yang dapat ditujukan kepada masyarakat umum.²⁹ Kebijakan berkaitan erat dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan terhadap orang-orang yang banyak menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan merupakan sebuah instrumen atau alat yang digunakan untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.

Pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara benar dan tepat sasaran dan berdayaguna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks teori dan modal yang mampu menjelaskan ketetapan pelaksanaan kebijakan tersebut. Analisis kebijakan perlu dilakukan

²⁷ Rangkuti, *Analisis Swot Teknik Analisis Membelah Kasus*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012. Hlm. 103

²⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Public, cet 1*, Yogyakarta: CAPS, 201. Hlm. 19

²⁹ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Public*, edisi ke 2, Jakarta: Salemba Humanika, 2012. Hlm.5

terutama berkenaan dengan dampak yang dihasilkan. Kajian pelaksanaan kebijakan tidak bertentangan dan merugikan kepentingan masyarakat.³⁰

Kebijakan adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*actions*) dari pemerintah dalam fokusnya terhadap kebutuhan publik. Pada dasarnya, kebijakan merupakan salah satu bentuk yang dapat diterapkan dalam memenuhi kinerja sistem birokrasi pemerintah. Dengan begitu, regulasi kebijakan itu akan melahirkan pokok bahasan dalam implementasi kerja yang baik dan nyata untuk masyarakat. Seperti halnya, kebijakan ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan lain sebagainya. Dari semua aspek tersebut mengarah pada satu tujuan bersama yakni pengelolaan pemerintah yang baik. Namun, kebijakan tersebut tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan yang timbul dalam diri masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi perbincangan menarik dikalangan intelektual karena selalu mengacu pada dampak dan bidang dari ketidakadilan yang disebabkan oleh pemerintah.³¹

Menurut William Dunn sebagaimana dituliskan kembali oleh Widodo J. Pudjirahardjo pada blognya tentang pengertian kebijakan mengatakan bahwa: “kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat”. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan hukum (*law*) dan peraturan (*regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan inspiratif, meskipun kebijakan

³⁰ Edi Suharto, PhD. *Penerapan kebijakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008. Hlm. 2

³¹ Suryana Fermana. *Kebijakan Public Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009. Hlm. 1.

juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan jugadiharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.”

Dalam hubungan dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat, kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah awal untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diutarakan. Sebagai langkah awal untuk merumuskan kebijaksanaan, maka dibutuhkan pemahaman dan batasan masalah atau (Persepsi/definisi). Pemahaman itu merupakan hal yang penting pada sebuah awal tahapan pengembangan dan pelaksanaan kebijaksanaan dan merupakan defenisi dari problem. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemahaman mengarah pada kejadian atau peristiwanya, sedangkan definisi mengarah pada problemnya.³²

D. Defenisi Operasional

1. Strategi

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan Anda. Strategi didefinisikan sebagai proses penentuan rencana CEO yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan melibatkan pengembangan metode dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut.³³

Strategi merupakan pola keputusan dari alokasi sumber yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kekuatan internal dan eksternal didalam menghadapi setiap perubahan.³⁴

³²William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2003. Hlm. 59

³³K. marrus. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Rajawali Press: Jakarta, 2002. Hlm. 9

³⁴Rochaety, *Manajemen Strategi*. Bandung : Alfabeta, 2005. Hlm 78

2. Pemerintah

Pengertian pemerintahan melihat kata *government* atau *government* dari segi bahasa, kedua kata ini berasal dari kata *command* yang berarti sesuatu yang harus dilakukan. Kata tersebut mengandung beberapa elemen yang memiliki ciri-ciri kata perintah³⁵

Menurut Soemender dalam buku Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul *Etika pemerintahan*, pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan komunikasi serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.³⁶

3. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, memungkinkan mereka untuk hidup dan berkembang secara wajar sehingga dapat menjalankan fungsi sosial.³⁷

4. Nelayan Tradisional

Secara umum, nelayan tradisional mengacu pada nelayan yang menggunakan sumber daya perikanan dengan alat tangkap tradisional, modal komersial kecil, dan organisasi penangkapan ikan yang relatif sederhana.³⁸

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³⁶Inu kencana, *Etika Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2011. Hlm.36

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.

³⁸ Shinta Septina. *System Social-Budya Pantai: Mata Pencirian Nelayan Dan Pengola Ikan Di Kelurahan Panggung*, Vol 13, No 1, 2018. Hlm. 7

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan undang-undang No. 54 Tahun 1999 dan undang-undang No. 14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 km² atau 10,2 % dari luas wilayah provinsi Jambi, namun sejalan dengan berlakunya undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 29 pulau kecil (11 di antaranya belum bernama) menjadi 13.102,25 km². Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5 % dari panjang pantai Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0°53' - 1°41' LS dan 103°23 - 104°31 BT dengan luas 5.445 Km² dengan ketinggian Ibu kota-Ibu kota Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1–5 m dpl. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 km².

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, seluruh kawasan mempunyai kelerengan antara 0 – 3 % (datar). Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian dengan syarat input drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang. Berdasarkan hasil studi serta pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya, semua elevasi di daerah rawa-rawa sepanjang Sungai Batanghari dinyatakan dalam acuan ketinggian yang sama, yaitu dalam meter di atas *Project reference Level* (M +

PRL). Acuan ketinggian di kawasan perencanaan diambil dari ketinggian BM (*Bench Mark*) BK 63.³⁹

Berbeda dengan kabupaten lainnya di Provinsi Jambi, sebagian besar penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersal dari luar Jambi atau pendatang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam sensus penduduk Indonesia tahun 2000, sebagian besar penduduk Kabupaten Tanjung jabung Timur berasal dari suku Jawa dan Bugis. Sementara suku lainnya adalah suku Melayu, Banjar, Jambi, sebagian lagi suku Sunda, Minangkabau, Batak, Tionghoa, dan Suku lainnya.⁴⁰

1. Lokasi

Tabel 2
Identitas Dinas Kelautan dan Perikanan⁴¹

No	IDENTITAS DINAS KELAUTAN	
1	Nama Instansi	Dinas Perikanan Tanjung Jabung Timur
2	Alamat Instansi	Jl. Bhayangkara Kantor Bersama Lantai II Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat
3	Kepala Instansi	Drs. Ibnu Hayat, MM
4	Kecamatan	Muara Sabak Timur
5	Kabupaten	Tanjung Jabung Timur
6	Provinsi	Jambi
7	Kode Pos	-
8	Tahun Berdiri	2000
9	E-mail	perikanan@tanjabtimkab.go.id
10	Website	http://perikanan.tanjabtimkab.go.id
11	Kontak instansi	-

³⁹ <http://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur>.

Diakses pada 29 Juni 2022

⁴⁰ <https://jambi.bps.go.id/indicator/12/1107/1/penduduk-menurut-wilayah-administrasi-dan-suku-bangsa.html>

Diakses pada 29 Juni 2022

⁴¹Dokumentasi Dinas Kelautan Tanjung Jabung Timur

2. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjung Jabung

Adapun visi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjung Jabung Timur adalah “Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Perikanan Tanjung Jabung Timur Yang Bernuansa Lingkungan Menjadi Sumber Pendapatan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2021”.

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjung Jabung Timur adalah

- a) Peningkatan Budidaya Perikanan laut, darat dan tangkap
- b) Peningkatan produksi olahan hasil perikanan.⁴²

3. Tugas dan Fungsi

Tabel 3
Tugas Pokok dan Wewenang Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Tugas Dinas Perikanan
1	Menetapkan kebijakan teknis dibidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan, dan pemasaran perikanan.
2	Menetapkan program kerja dinas perikanan sesuai dengan kebijakan teknis dinas
3	Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang perikanan budidaya.
4.	Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang perikanan tangkap.
5	Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran perikanan.
6	Melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan unit pelaksanaan teknis dinas.
7	Mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
8	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas.

Tabel 4
Fungsi Dinas Perikanan

No	Fungsi
1	Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan, dan pemasaran perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Pembinaan, pengawasan perikanan, dan evaluasi penyelenggaraan bidang perikanan tangkap.
3	Pembinaan, pengawasan perikanan, dan evaluasi penyelenggaraan bidang sumber daya perikanan.

⁴² Wawancara dengan Ibu Deffriany, S.Pi Selaku kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap, pada tanggal 10 November 2021

4	Pembinaan, pengawasan perikanan, dan evaluasi penyelenggaraan bidang UPTD
5	Pengelolaan urusan kesekretariatan.

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

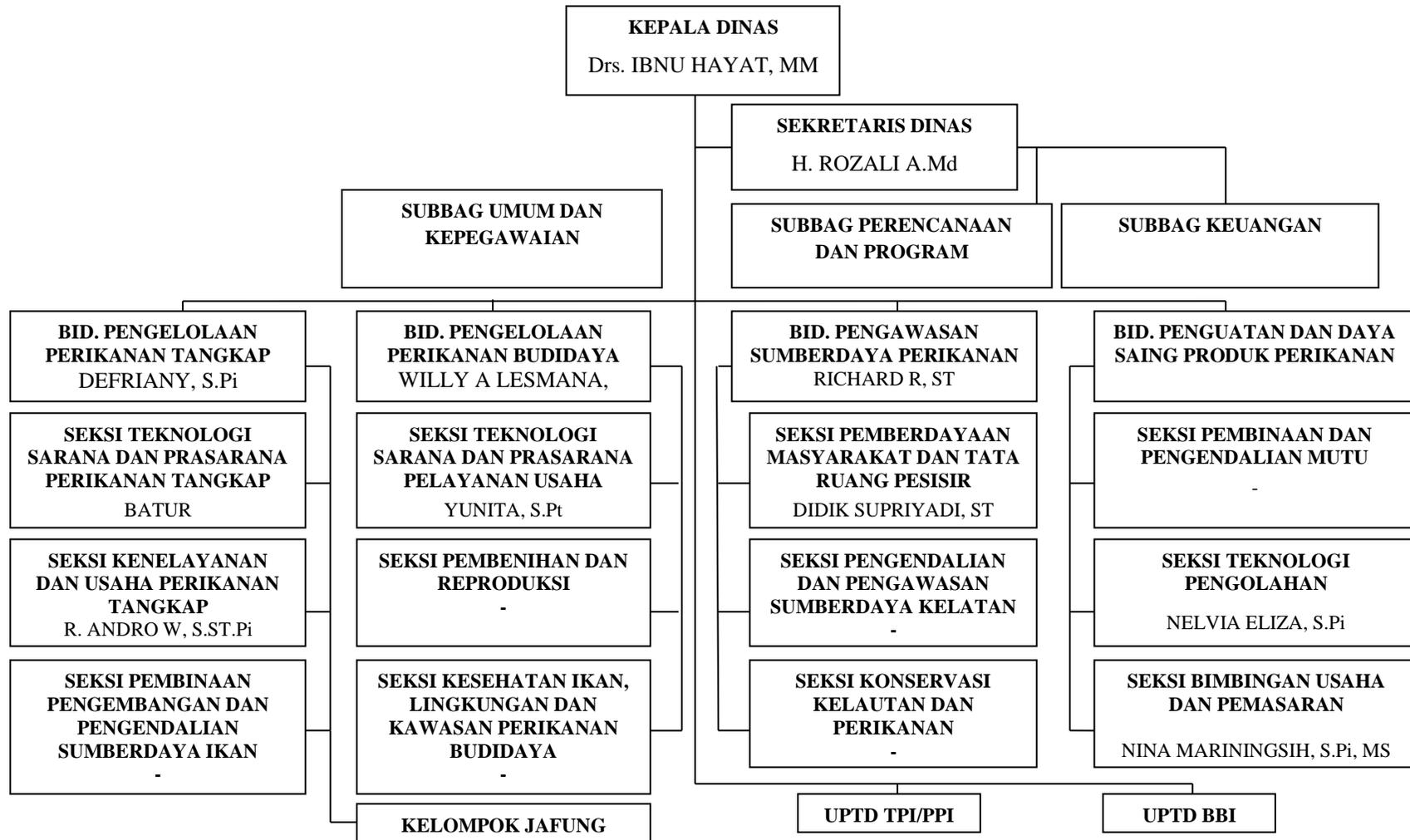


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

D. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan perikanan Tanjung Jabung Timur.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 48 orang. 26 berstatus PNS, diantaranya berpendidikan S2 berjumlah 3 orang, S1 14 orang, D3 5 Orang dan SMA 4 orang. Diantaranya menjabat sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Dinas, Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kabid Sumber Daya Perikanan, Kabid PDSPP, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasi Teknologi Sarana dan Prasarana Tangkap, Kassubag Perencanaan dan Program. Kasi teknologi Pengolahan, Kasi Kenelayanan dan Usaha Perikanan Tangkap. Kasi Bimbingan Usaha dan Pemasaran, Kasi Teknologi Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Usaha, Kasi Pembinaan Pengembangan dan Pengendalian Mulu, Kasi Pembenihan dan Produksi, Kasi Pengendalian Konservasi, Pengelola Kegiatan, Analis Sumber Daya Ikan, Pengelola Pengawasan Penangkap Ikan, Pengadministrasi Kepegawaian, Pengadministrasi Keuangan. Status Phtt berjumlah 22 orang, diantaranya berpendidikan SI 3 orang, D3 lorang dan SMA 18 orang. Diantaranya menjabat sebagai Phtt Bidang Sekretariat. Phtt Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, phtt bidang pengelolaan perikanan Budidaya, Phti Sumber Daya Perikanan, Phtt Bidang Pengelola Perikanan Tangkap. Phtt adalah Pegawai Honorer Tidak Tetap. Tenaga Honor tidak memiliki kontrak kerja, pekerjaannya selama dibutuhkan dan di gaji oleh pemda setempat.⁴³ Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai yang memenuhi syarat, diangkat oleh pejabat

⁴³Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjung jabung Timur, 2021

yang berwenang dan disertai dalam suatu jabatan negeri dan digaji dari Badan Kepegawaian.

B. Profil Kecamatan Nipah Panjang

1. Aspek Geografis

Secara Geografis Kecamatan Nipah Panjang memiliki luas wilayah sekitar 234,7 km², ibu Kota Kecamatan ini adalah Nipah Panjang II dan berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan di bagian Utara, Kecamatan Rantau Rasau di bagian Selatan, Kecamatan Sabak Timur di bagian Barat dan Kecamatan Sadu di bagian Timur.

Nipah Panjang yang terbentuk berdasarkan SK Mendagri No. 45 Tahun 1974 tanggal 6 Maret 1974, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (LN. No. 182 Tambahan LN No.3909) Kecamatan Nipah Panjang termasuk kedalam bagian Kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kecamatan Nipah Panjang Terletak antarl^o, 03 LS sampai 1^o, 23 LS dengan 104^o 05 BT sampai 104^o, 20 BT, dengan ketinggian 0 sampai 10 M dpl. Suhu berkisar antara 25^oC - 33^oC, dengan Curah hujan lebih kurang 8,486 mm/Tahun.⁴⁴

Luas beserta persentase desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Nipah Panjang akan digambarkan secara rinci melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 5
Luas Desa/ Kelurahan dan Persentasenya

NO	Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Sungai Raya	20,25	8,63
2	Teluk Kijing	18	7,67

⁴⁴Dokumentasi Profil Kantor Camat Nipah Panjang, 26 November 2021

3	Pamusiran	12	5,11
4	Kel. Nipah Panjang I	49,94	21,28
5	Kel. Nipah Panjang II	20,54	8,75
6	Simpang Datuk	22,60	9,63
7	Simpang Jelita	13,50	5,75
8	Bunga Tanjung	14,34	6,11
9	Sungai Tering	18,53	7,99
10	Sungai Jeruk	45	19,17
Jumlah total		2334,7	100

Dengan luas wilayah mencaapai 234,7 km², Kecamatan Nipah Panjang sendiri terbagi menjadi 2 kelurahan dan 8 desa, Kecamatan Nipah Panjang juga memiliki 3 macam kondisis geografis:

Tabel 6
Letak Desa/Kelurahan Berdasarkan Kondisi Geografis

NO	Desa/kelurahan	Kondisi Geografis
1	Kel. Nipah Panjang I	Pesisir
2	Kel. Nipah Panjang II	Daerah Aliran Sungai
3	Simpang Datuk	Dataran
4	Sungai Raya	Daerah Aliran Sungai
5	Teluk kijing	Pesisir
6	Pamusiran	Pesisir
7	Simpang Jelita	Pesisir
8	Bunga Tanjung	Pesisir
9	Sungai Tering	Daerah Aliran Sungai
10	Sungai Jeruk	Daerah Aliran Sungai

2. Aspek Demografis

a. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya

Dalam pembangunan sebuah daerah jumlah penduduk yang besar merupakan modal sekaligus tantangan dalam pembangunan, penduduk adalah bagian terpenting dalam suatu daerah. Oleh kaerana itu prlu diketahui sekilas tentang

kepadatan penduduk di Kecamatan Nipah Panjang maka akan dijelaskan secara rinci dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Penduduk dan Kepadatannya

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Sungai Raya	1072	52,94
2	Teluk Kijing	1051	58,39
3	Pamusiran	1092	91
4	Nipah Panjang I	65,98	132,12
5	Nipah Panjang II	9294	452,48
6	Simpang Datuk	1090	48,23
7	Simpang Jelita	802	59,41
8	Bunga Tanjung	13,90	96,93
9	Sungai Tering	1852	99,95
10	Sungai Jeruk	12,69	28,18
	Jumlah total	25509	108,69

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting adanya bagi kehidupan, kemajuan sebuah daerah dipengaruhi oleh sumberdaya manusia dan generasi muda daerah tersebut dimana setiap orang sangat membutuhkan dan berhak mendapatkan pendidikan dengan tujuan masyarakat berkembang dan bertambah pengetahuan dengan adanya pendidikan. Dengan adanya pendidikan manusia akan menjadi lebih terdidik, cerdas dan tentunya akan mampu bersaing dengan individu lainnya.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk kemajuan sebuah bangsa, karena kemajuan sebuah bangsa diukur dari mutu pendidikan yang baik sehingga mampu membentuk generasi muda yang hebat dan mampu bersaing. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk selalu meningkatkan mutu dan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan evaluasi mutu pendidikan.

Hasil observasi peneliti di Kecamatan Nipah Panjang, pendidikan di Kecamatan Nipah Panjang cukup berkembang sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kecamatan sangat memperhatikan pendidikan. Adapun rincian bangunan pendidikan di Kecamatan Nipah Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Bangunan Pendidikan

NO	Desa /Kelurahan	Jumlah Sekolah		
		SD	SMP/MTs	SMA/SMK
1	Sungai Raya	3	1	-
2	Teluk Kijing	1	-	-
3	Pamusiran	2	1	-
4	Kel. Nipah Panjang I	4	2	1
5	Kel. Nipah Panjang II	8	1	2
6	Simpang Datuk	2	1	-
7	Simpang Jelita	1	-	-
8	Bunga Tanjung	2	-	-
9	Sungai Tering	3	1	-
10	Sungai Jeruk	1	1	-
Jumlah total		27	8	3

c. Kesehatan

Ketersediaan fasilitas umum seperti puskesmas yang memadai dan tenaga medis yang ahli dalam bidangnya adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia. Maka pelayanan kesehatan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipenuhi. Di Kecamatan Nipah Panjang pada saat ini belum mempunyai rumah sakit, yang ada hanya Puskesmas yang berjumlah 2 Puskesmas.

d. Sarana Ibadah

Di Kecamatan Nipah Panjang dengan jumlah penduduk mencapai 25.509 jiwa, dan tercatat sebanyak 25.078 orang muslim, 312 orang kristen, 14 orang



katolik, dan 105 orang Budha. Walaupun mayoritas penduduknya muslim namun banyak juga yang non muslim, sedangkan untuk tempat ibadah di Kecamatan Nipah Panjang hanya mempunyai 40 masjid dan 38 mushola untuk muslim dan tidak ada tempat ibadah untuk yang non muslim.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Tradisional di Kecamatan Nipah Panjang

Peningkatan kualitas sumberdaya alam khususnya pada sektor kelautan dan perikanan memerlukan strategi atau rencana jangka panjang maupun jangka pendek dan kebijakan dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tnjug Jabung Timur mengingat banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan hidup dengan keadaan ekonomi yang tergolong ekonomi lemah. Pemerintah mengusahakan program modernisasi armada dan alat penangkapan ikan yaitu dengan memberikan bantuan perahu sehingga nelayan berangsur-angsur memiliki modal baik biaya dan perahu sendiri yang layak untuk digunakan. Dengan demikian, jangkauan operasi penangkapan menjadi lebih jauh sehingga akan berkorelasi positif terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sektor hasil laut karena Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Kabupaten yang mayoritas wilayahnya berada di pesisir. Sesuai dengan misi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdapat didalam dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim).” Visi tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan

menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.⁴⁵ Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan adanya terobosan berupa strategi yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat nelayan agar lebih baik melalui sektor kelautan dan hasil perikanan.

Dalam meningkatkan suatu kualitas perikanan maka perlu adanya suatu strategi dan kebijakan dalam pembangunan. Perumusan kebijakan pembangunan untuk mendukung pengembangan perekonomian haruslah memuat:

1. Strategi dasar pemecahan masalah
2. Pencapaian sasaran pemecahan masalah
3. Kebijakan pendukung (secara tidak langsung)
4. Kebijakan berorientasi program (secara langsung)⁴⁶

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai beberapa program yaitu:

1. Program bantuan perahu (pompong)

Program bantuan terhadap nelayan ini bertujuan untuk menunjang kinerja nelayan. Sejauh ini sudah banyak bantuan yang diberikan untuk para nelayan baik dari seri materil dan non materil. Di Kecamatan Nipah Panjang tercatat sejak tahun 2016 ada 2 KUB yang mendapatkan bantuan berupa jaring plentir dan jaring *tramell nets* dan untuk nelayan yang tidak tergabung dalam KUB ada juga yang mendapat bantuan dalam bentuk perahu nadi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi sejak tahun 2019 sebanyak 2000 unit perahu yang terbagi untuk 5 Kecamatan yang berada

⁴⁵ RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021, Hlm.172.

⁴⁶ Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah*, Hlm 223.

di pesisir wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Dan Kecamatan Mendahara.⁴⁷

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan observasi dilapangan yang dilakukan di Kampung nelayan penulis memperoleh data penerima bantuan dari tahun 2017 hingga 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 9
Daftar Penerima Bantuan Khusus Nelayan
Kecamatan Nipah Panjang⁴⁸

No	Nama Pemilik Rumah	Jenis Bantuan			Tahun
		Rumah	Perahu	Alat Tangkap	
1	M. Tarsim	✓	✓	✓	2019
2	Jupriadi	✓	✓	✓	2019
3	Bukhari	✓	✓	✓	2019
4	Jamaludin	✓	✓		2019
5	Razali	✓			2019
6	Sapturi	✓			2019
7	Hario	✓			2018
8	Anwar	✓			2018
9	Emi Yanto	✓			2018
10	Firdaus	✓			2018
11	Tabak	✓			2018
12	M. Rizal	✓	✓	✓	2019
13	Sonen	✓	✓	✓	2018
14	Junadi	✓			2020
15	Rozi	✓			2019
16	M. Arpah	✓			2019
17	Abdul Roni	✓			2018
18	Hasyim	✓			2018
19	M. Said	✓			2018
20	Jumardi	✓			2018
21	Anto	✓			2017
22	Hendra	✓			2020
23	Syafarudin	✓			2018

⁴⁷Dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 16 November 2021.

⁴⁸ Observasi di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 10-14 November 2021.

24	Burhan	✓			2018
25	Zainal A.	✓			2017
26	Dahlan	✓			2018
27	Gusnadi	✓			2018
28	Indra Gusnadi	✓			2018
29	Herman	✓			2018
30	M. Sidik	✓			2018
31	M. Yudi	✓			2019
32	Hidayat	✓	✓		2019
33	Pardana	✓	✓	✓	2019
34	Aris Febrian S.	✓			2018
35	Faisal	✓			2019
36	Jupriadi	✓			2019

Dari hasil observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti diperoleh juga beberapa bentuk fisik bantuan perahu yang diterima oleh nelayan tradisional adalah sebagai berikut

Gambar 4.1
Bantuan Perahu Nadi



Namun banyak nelayan yang kerap menyalahgunakan dan mengalihfungsikan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan yang seharusnya untuk penunjang kemajuan pembangunan ekonomi tapi pada kenyataannya yang terjadi

dilapangan justru bantuan tersebut banyak yang dialihfungsikan. Contohnya seperti bantuan perahu nadi banyak nelayan yang menjual perahunya ke pihak lain dengan berbagai alasan seperti kebutuhan yang mendesak, perahu yang sulit dikendalikan dan berbagai alasan lainnya. Sebenarnya dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan telah memberi himbauan tentang bagaimana cara perawatan perahu tersebut hingga pemberian sanksi kepada nelayan yang nekat menjual dan mengalihfungsikan perahu bantuan dari pemerintah.⁴⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Richard R. ST selaku kabid Pengawasan Sumberdaya Perikanan, beliau menjelaskan bahwa:

“Kami dari Dinas Kelautan khususnya bidang pengawasan sumberdaya perikanan tak jarang mengadakan sosialisasi pembinaan dan pelatihan untuk bapak-bapak nelayan tentang bagaimana cara mengatasi kerusakan yang terjadi pada perahu tangkap mereka dengan cara mendatangkan narasumber yang ahli dalam mesin. Untuk pemantauan, kami dari Dinas Kelautan tidak bisa memantau secara langsung karena karena kondisi geografis yang jauh. Jadi, untuk pemantauan kami serahkan pada petugas sahabandar atau PPI Nipah Panjang”.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan langsung oleh Ibu Deffriany selaku kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjung Jabung Timur, beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu kendala bagi kami Dinas Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan bantuan dari pemerintah dengan baik, karena fakta dilapangan dan laporan dari berbagai pihak bahwa tidak sedikit nelayan yang menjual perahu nadi bantuan dari pemerintah, kami juga bingung dengan sanksi apa yang harus diberikan kepada mereka. Jika masalah tersebut dinaikkan ke kejaksaan nanti akhirnya akan menimbulkan masalah baru namun jika itu dibiarkan maka nelayan tidak akan menjadi lebih baik kedepannya. Belajar dari kesalahan dan keadaan maka Dinas Kelautan dan Perikanan hanya memberikan sanksi berupa teguran, pencabutan hak bantuan hingga

⁴⁹Observasi di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Nipah Panjang. 10-14 November 2021

mengembalikan bentuk bantuan kembali ke pemerintah yang nantinya akan kami pindah atau kami alihkan ke nelayan lain yang bertanggungjawab.”⁵⁰

Pelaksanaan program bantuan kapal dan alat tangkap ikandiharapkan sudah tepat sasaran. Sasaran yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin secara bertahap, terbentuknya sistem dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Sebuah program hendaknya harus dilakukan dengan tepat sasaran, agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Razali selaku nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang, peneliti memperoleh informasi sebagai berikut:

“Iyo betul pernah kami ado dapat bantuan perahu ketek samojaring ikan, tapi yang dapat bantuan tu memang perahunya sudah benar-benar bermasalah rusak, tapi ya memang banyak yang malah dijual perahunya, ya karna faktor ekonomi, jadinya menurut bapak ya harus di lihat lihat kalau mau memberi bantuan kepada nelayan biar lebih tepat sasaran, karna kan bantuannya terbatas hanya 200 unit perahu nadi”.⁵¹

Wawancara peneliti dengan nelayan lainnya yaitu, Bapak Tarsim diperoleh keterangan tentang bantuan kapal dan alat tangkap ikan. Beliau mengatakan sebagai berikut:

”Pemberian bantuan kapal dan alat tangkap ikan ni memang tidak seluruhnyadikasisama nelayan, nelayan yang akan dapat bantuan benar-benar di data sama perangkat desa sesuai kebutuhan dan kemampuannya, karena memang jumlah kapal yang dikasi pemerintah tu terbatas, apalagi jumlah nelayan yang ada ni hampir mencapai 200 nelayan lebih sehingga tidak mungkin dikasisama nelayan secara keseluruhan, maka dari itu pemberian kapalnya juga sangat dipertimbangkan.”⁵²

⁵⁰Wawancara dengan Ibu Deffriany S.Pi, kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten tanjung jabungg Timur, 10-14 November 2021

⁵¹Wawancara dengan Bapak Razali, nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang 25-26 november 2021

⁵²Wawancara dengan Bapak Tarsim selaku nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang, 25-26 november 2021

Ibu Deffriany selaku kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menambahkan mengenai permasalahan tersebut, sebagai berikut:

“Menurut saya nelayan ini adalah profesi yang sangat fleksibel, kenapa saya katakan begitu, karena nelayan adalah pekerjaan yang langsung berhubungan dengan alam. Mereka tidak bisa mematok hasil tangkapan mereka sendiri karena pekerjaan mereka dipengaruhi oleh cuaca dan musim. Nelayan yang sudah punya banyak modal dengan perahu-perahu besar tidak begitu terdampak dengan cuaca sehingga hasil tangkapannya juga tidak terpengaruh. Beda dengan nelayan kecil yang hanya menggunakan perahu nadi yang kecil secara otomatis mau tidak mau kalau cuaca buruk mereka langsung mendarat”⁵³

Berdasarkan penuturan informan pelaksanaan program bantuan kapal dan alat tangkap ikan selama ini memang sudah tepat sasaran karena pemerintah memberikannya sesuai keadaan para nelayan, jika para nelayan memiliki kapal yang masih bagus dan masih berfungsi dengan baik memang belum dapat giliran mendapat bantuan kapal. Sayangnya, sebagian nelayan tradisional malah menyalahgunakan bantuan tersebut. Setiap program pemberdayaan masyarakat memang harus dilaksanakan sesuai dan tepat sasaran. Pemberian bantuan kapal dan alat tangkap ikan ini memang tidak seluruhnya dapat diperoleh oleh para nelayan, nelayan yang akan dapat bantuan benar-benar di data oleh perangkat desa sesuai kebutuhan dan kemampuannya, karena memang jumlah kapal yang diberikan pemerintah juga terbatas. Apalagi jumlah nelayan yang ada hampir mencapai 200 nelayan lebih sehingga tidak mungkin diberikan seluruh nelayan tradisional. Namun hal tersebut bukanlah faktor kesengajaan melainkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.

⁵³Wawancara dengan Ibu Deffriany S.Pi, KABID Pengelolaan Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 10-14 November 2021

Program pemberdayaan yang baik juga mampu memunculkan berbagai potensi khas masyarakat yang akan mempercepat proses pemberdayaan. Pembangunan jangka panjang memiliki keterkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi yang dinamis.⁵⁴

2. Program Bantuan Alat Tangkap.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Razali selaku nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah ya nak pemerintah ini memberikan bantuan yaitu bantuan alat tangkap buat kami, lebih mudah dapat ikannya, beda sama sebelum dikasi alat tangkap kami nangkap ikan tu terbatas. Senanglah rasanya bapak ternyata pemerintah peduli sama kami yang nelayan tradisional ni”⁵⁵

Wawancara peneliti dengan nelayan lainnya yaitu, Bapak Usman selaku nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang yang mengatakan bahwa:

“Kalau Bapak ya sangat senang karna selain dikasi bantuan alat tangkap ikan, kami jugak dikasi tau cara-cara menggunakan alat tangkap itu sehingga kami yang awam ini bisa menggunakan alat tangkap itu dengan baik”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Heni selaku istri nelayan di Kecamatan Nipah Panjang, beliau mengatakan bahwa:

”Kalo saya pribadi ya cukup senang lah karena yang pertama nggak ngeluarin modal yang tadinya duitnya untuk beli jaring bisa buat kebutuhan sehari-hari, apalagi bahan-bahan pokok sekarang pada naik belum lagi untuk kebutuhan anak kecil susu pampers itu lumayan juga pengeluarannya”

⁵⁴Observasi di rumah nelayan Kecamatan Nipah Panjang.

⁵⁵Wawancara dengan bapak razali, selaku nelayan tradisional di kecamatan Nipah Panjang, 25-27 November 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan program alat tangkap ini diberikan sebagai pengalihan, maksudnya adalah setiap nelayan yang dulunya melaut dengan menggunakan alat tangkap *trawl* maka dengan program ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberi bantuan sekaligus memberikan edukasi kepada nelayan dengan alat tangkap yang baru dan tidak merusak ekosistem laut serta lebih ramah ramah lingkungan.⁵⁶

Gambar 4.2
Alat Tangkap Jaring



3. Program Pengembang Usaha Masyarakat Pesisir (PUMP)

Program Pengembang Usaha Masyarakat Pesisir (PUMP) ini adalah salah satu program yang sangat baik apabila berjalan sebagaimana mestinya. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat pesisir bagaimana cara pengolahan, pemanfaatan hingga pemasaran hasil sumberdaya laut dengan baik dan efisien sehingga mampu meningkatkan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir tersebut.

⁵⁶Observasi di rumah nelayan Kecamatan Nipah Panjang.

Ibu Deffriany, selaku kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengatakan:

“Dalam upaya untuk terus selalu meningkatkan hasil sumberdaya laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kita ini, kami selalu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap nelayan tanpa tebang pilih. Dalam hal ini setiap sektor yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan selalu memberikan kontribusinya masing-masing dalam bidang perikanan dengan kata lain tidak ada sektor khusus melainkan semua sektor harus maksimal dan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing”⁵⁷

Walaupun upaya pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah dilakukan untuk mencapai hasil optimal, namun atmosfer otonomi daerah dan keterbukaan akan memberikan harapan terhadap upaya meningkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat dikawasan pesisir sebagai subjek untuk mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya aktifitas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Berikut wawancara peneliti dengan Ibu Siti salah satu istri nelayan tradisional setempat:

“Dulu Sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan di desa kami ini. Seperti pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan modal untuk melaut, tentang pelatihan melakukan peminjaman modal yang efektif, tentang tata kelola dalam melaut bak cara yang tepat dan melakukan penjualan hasil melaut. Kalau partisipasi masyarakat saya lihat cukup ditanggapi oleh para nelayan, biasanya banyak yang datang apalagi kalau untuk perempuan, itu ibu-ibu dirumah biasa cepat-cepat kerja pekerjaan rumahnya supaya bisa ikut dalam kegiatan itu. Kami disini kalau masalah ikut berpartisipasi ya kami sangat senang, karena itu kegiatan berguna supaya bertambah juga pengetahuan tapi semenjak ada covid 19 ini baru sekali diadakan pelatihan seperti itu lagi.”⁵⁸

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara di lapangan partisipasi masyarakat terlihat dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan baik oleh

⁵⁷Wawancara dengan Ibu Deffriany S.Pi, KABID Pengelolaan Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten tanjung jabung Timur, 10-14 November 2021

⁵⁸Wawancara dengan ibu fatimah selaku istri dari nelayan tradisional setempat, 25-26 november 2021

pemerintah maupun swasta sangat disambut baik dan masyarakatnya sangat antusias untuk turut serta meramaikan dan mengikuti pelatihan hal ini sangat mendukung pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan masyarakat pesisir karena selain dapat menyukkseskan kegiatan yang dilaksanakan tersebut keinginan pemerintah daerah untuk memberdayakan para masyarakatnya juga dapat tercapai dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk pribadi masyarakat itu sendiri.

Gambar 4.3
Pelatihan Ibu-Ibu Nelayan



4. Program Pembinaan Masyarakat

Program pembinaan masyarakat ini sangat penting dilakukan secara berkelanjutan karena untuk mengingatkan dan meningkatkan pengetahuan nelayan dalam bidang kelautan, karena tidak sedikit nelayan yang mungkin belum memahami aturan-aturan melaut dan bagaimana cara menjaga kestabilan ekosistem agar hasil tangkapan meningkat tetapi tidak merusak alam, mungkin mereka yang arogan dan hanya mementingkan kepuasan sesaat tidak berfikir bagaimana merawat dan menjaga alam agar tetap bisa bermanfaat hingga anak cucunya. Hal inilah yang

menjadi tujuan pembinaan tersebut biasa materi yang disampaikan mengenai peningkatan kualitas nelayan dalam bidang pengetahuan teknologi dan bagaimana cara merawat laut dengan baik serta menyampaikan aturan-aturan dan larangan mengenai perusakan laut dan sumberdaya alam.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sarifudin selaku nelayan di Kecamatan Nipah Panjang mengatakan bahwa:

“Iya benar kami dikasi pembinaan atau sosialisasi, kami dikasi pengetahuan bagaimana kami menjaga ekosistem dilaut, jadi tidak dibolehkan pakai bahan kimia untuk menangkap ikan ya misalnya semacam racun atau tidak bom peledak jadi kami diarahkan larangan-larangannya jadi kami harus mengikuti aturan pemerintah, ya tidak masalah memang tapi yang buat kami berat tu ketika pada saat diadakan sosialisasi atau pembinaan, jarak tempuhnya jauh jadi kami malah ngeluarin biaya, ya mau tak mau yang menghadiri sosialisasi dan pembinaan tu hanya mewakili saja tidak seluruh nelayan yang datang kesana”⁵⁹

Bapak Usman selaku nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang menambahkan sebagai berikut:

“Kami tidak dibolehkan lagi pakai pakai racun dek nangkap ikannya katanya bisa merusak ekosistem yaudahlah akhirnya kami ikut peraturan pemerintah waktu diadakan pembinaan tu kan dijelas sama mereka larangan larangannya apa aja, cuman sayangnya kalau mau pembinaan tu kami ngeluarkan biaya karna jauh tempat pembinaannya tu palingan mewakili sajalah, nantikkan kami bakal dengar jugak dari berita angin apa aja yang dijelaskan sma pemerintah’.⁶⁰

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan program pembinaan dan sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan masyarakat nelayan dalam segi pengelolaan penangkapan dan pemanfaatan sumberdaya hasil laut secara optimal dan tentunya tidak merusak

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Jupriadi selaku nelayan tradisional kecamatan Nipah Panjang, 25-26 november 2021

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Usman selaku nelayan tradisional kecamatan Nipah Panjang, 25-26 november 2021

ekosistem. Dalam sosialisasi tersebut biasanya materi yang disampaikan adalah tentang bagaimana menjaga ekosistem laut dengan tidak menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti racun dan bom peledak pada saat melakukan penangkapan ikan dan aturan-aturan tentang apa saja larangan yang dibuat oleh DKP Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta melakukan pembinaan terhadap nelayan. Pembinaan seperti ini baik dilakukan secara continue dan berkelanjutan karena akan mampu meningkatkan kualitas dan jumlah sumberdaya manusia baik dari segi pola pikir ataupun dalam segi keterampilan dan kemampuan, sehingga nantinya nelayan mampu berfikir secara kritis dan luas mengenai wawasan dalam menguasai teknologi dan mampu berinovasi menjawab tantangan-tantangan zaman untuk dapat meningkatkan kemampuan memanfaatkan sumberdaya laut serta memupuk kesadaran dikalangan nelayan lainnya tentang betapa pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan efisien. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti namun untuk mewujudkan itu semua tidak sedikit kendala yang dihadapi dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan tersebut biasanya terkendala pada dana dan letak geografis yang sangata jauh sehingga pembinaan tersebut tidak bisa melibatkan banyak nelayan yang ada sehingga mereka hanya perwakilan saja.

Gambar 4.4
Sosialisasi dan Pembinaan Nelayan



5. Program Asuransi Nelayan

Hasil wawancara dengan Bapak Jupriadi selaku nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang mengatakan bahwa:

“Semenjak ada asuransi nelayan kami pada saat mencari ikan merasa tenang aman ya karna merasa terlindungilah, tidak ada lagi kami merasa ketakutan otomatis tangkapan kami juga jadi meningkat”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Heni selaku istri nelayan di Kecamatan Nipah Panjang, Beliau mengatakan bahwa:

“Saya di rumah merasa lebih tenang karna suami saya bekerja sudah ada asuransinya, dulu sebelum adanya asuransi setiap suami saya melaut pasti perasaan cemas apalagi kalo cuaca buruk kayak angin kencang, ombak besar saya yang dirumah jadi pengen nyusul ke laut”⁶¹

Gambar 4.5
Kartu Asuransi Nelayan



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dilapangan kecelakaan kerja memang lumrah terjadi dalam setiap pekerjaan namun dengan adanya program asuransi nelayan atau jaminan terhadap nelayan ini agar lebih memberikan rasa aman dan nyaman terhadap nelayan, maka Kementerian Kelautan dan

⁶¹Wawancara dengan Ibu Heni selaku istri dari nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang, 25-26 november 2021

Perikanan memberikan asuransi atau jaminan terhadap nelayan, hal ini sebenarnya adalah salah satu upaya pemerintah untuk dapat terus meningkatkan sumberdaya laut dengan baik karena jika nelayan merasa nyaman dan merasa terlindungi dalam pekerjaannya maka akan mempengaruhi hasil tangkapan sehingga tangkapan nya akan meningkat.

Bapak Richard R, ST. kabid Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tanjung Jabung Timur menambahkan mengenai asuransi yang digunakan sesuai jenisnya sebagai berikut:

“Yang pertama Jika seorang nelayan mengalami kecelakaan atau musibah dan meninggal dilaut maka akan mendapatkan santunan sebesar 200 juta rupiah. kedua Jika seorang nelayan jatuh sakit dan meninggal di rumah maka akan diberikan santunan sebesar 150 juta rupiah. Ketiga jika seorang nelayan mengalami jatuh sakit atau kecelakaan kerja dalam kategori kecil maka akan diberikan biaya santuan berupa biaya pengobatan maksimal sebesar 20 juta rupiah.”⁶²

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan program tersebut diatas langsung dibentuk oleh kementerian Kelautan Dan Perikanan dan program ini sudah direalisasikan semenjak tahun 2016. Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas bahwasannya setisap lapisan masyarakat sangat perlu dukungan dan pentikng atau berhak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait tidak hanya dalam sektor kelautan tapi juga pada semua bidang karena dengan rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh pemerintah maka secara tidak langsung akan menciptakan ketenteraman dalam tatanan masyarakat yang baik pula.

6. Program Bantuan Rumah Subsidi

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Fatimah selaku istri nelayan di Kecamatan Nipah Panjang beliau mengatakan:

⁶²Wawancara dengan Bapak Richard R, ST. KABID Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tanjung Jabung Timur, 11 November 2021

“Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program bantuan subsidi rumah ini yang dulunya saya tinggal sama mertua sekarang sudah tidak lagi. Dikarenakan suami saya bekerja sebagai nelayan alhamdulillah mendapat rumah tinggal gratis tapi ketika suami saya melaut saya tetap pulang kerumah Ibu saya karena disini rumahnya masih banyak yang kosong”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan, pada tahun 2019 ada juga bantuan berupa rumah subsidi yang diberikan khusus untuk nelayan yang memang belum memiliki tempat tinggal sendiri namun sudah memiliki keluarga. Program yang dibuat pada tahun 2017 tersebut mulai disalurkan kepada nelayan pada awal tahun 2019 dengan bentuk bantuan fisik dalam bentuk rumah sebanyak 50 unit dan bertempat di kampung nelayan Kecamatan Nipah Panjang. Hingga saat ini rumah subsidi tersebut masih dalam kondisi baik dan terawat karena pada awal pemerintah memberikan bantuan tersebut nama-nama pemilik rumah yang telah menerima bantuan wajib tinggal, mengurus dan menjaga rumah subsidi tersebut. Untuk kategori nelayan yang berhak mendapat bantuan tersebut adalah nelayan yang mempunyai kartu anggota nelayan dan batasan usianya maksimal 65 tahun. Berdasarkan pengamatan hasil peneliti di Kecaamatan Nipah Panjang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Namun tidak semua nelayan mendapat bantuan seperti apa yang disebutkan diatas dikarenakan dalam segi ekonomi nelayan tradisional dan nelayan modern memiliki kesenjangan pendapatan yang cukup jauh sehingga pemerintah juga perlu kebijaksanaan dan ketelitian dalam memilih dan memilah mana klaster nelayan yang layak dan lebih perlu mendapatkan bantuan.



Gambar 4.6
Bantuan Rumah Subsidi



B. Hambatan dan Tantangan dalam Pembinaan Nelayan

Berdasarkan teori pelayanan publik terdapat lima indikator pelayanan publik yaitu, 1) *Tangibles*, yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan, 2) *Reliability*, *reability* atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat, 3) *Responsivess* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas, 4) *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan, 5) *Empathy* adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual.

Dilihat dari aspek dan indikator pelayanan publik yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Nipah Panjang, secara kasat mata pelayanan yang diberikan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana untuk nelayan yang sudah cukup maksimal. Dan menurut peneliti, pelayanan yang

diberikan sudah cukup baik, sesuai dengan indikator pelayanan publik. Misalnya fasilitas fisik, seperti peralatan, pegawai, dan komunikasi. Kemudian fasilitas non fisik seperti perhatian (*Empathy*), sosialisai kepada nelayan. Dan indikator yang lainnya seperti, responsivitas, dan kepastian sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis ada satu indikator yang masih menjadi hambatan dalam menciptakan suatu keberhasilan yaitu *Releability, reability atau* reabilitas, kemampuan menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat. Secara kasat mata bisa dikatakan berhasil namun apabila dilihat lebih detil sangat terlihat kelemahannya pelayanan yang dijanjikan secara akurat masih belum bisa dikatakan tepat.

Dalam tujuan menciptakan sebuah kemajuan suatu daerah melalui sebuah program tentunya dalam merealisasikan nya tidak semudah apa yang direncanakan, kendala dan hambatan pasti akan muncul ketika program tersebut sudah mulai diterapkan. Penerapan sebuah program merupakan sebuah proses dinamis, yang mana pelaksana sebuah program suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁶³ Penerapan sebuah program tersebut dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di masyarakat sehingga dikeluarkan suatu atau beberapa kebijakan tersebut.

Fasilitas dan pembangunan sarana prasarana pada bidang perikanan sangat penting adanya dan sangat dibutuhkan oleh para nelayan, misalnya pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan (PPI), pada dasarnya pangkalan pendaratan ikan merupakan salah satu pusat pengembangan masyarakat nelayan

⁶³Hayat. Muhamad Nuh, dkk. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Mikro, cet-1*. Jakarta: Prenadamedia Grup,2018. Hlm 85.

dan pertumbuhan ekonomi hasil kelautan, tempat pelayanan operasi kapal-kapal nelayan, pusa pemasaran dan distribusi hasil laut, tempat pengembangan industri mikro sektor kelautan. Dalam hal ini Kecamatan Nipah Panjang sendiri mempunyai Pangkalan pendaratan Ikan (PPI), namun pada kenyataannya PPI yang tersedia belum sepenuhnya dalam menjadi penolong bagi nelayan setempat, artinya Pangkalan Pendaratan Ikan yang ada di Kecamatan Nipah Panjang belum beroperasi secara maksimal sesuai fungsinya.

Namun fakta yang terjadi dilapangan meskipun kurang maksimalnya Pangkalan Pendaratan ikan yang ada di Kecamatan Nipah Panjang tetapi masih ada sedikit aktifitas nelayan yang dilakukan di PPI Kecamatan Nipah Panjang tersebut, berikut adalah beberapa kegiatan yang masih ada dan dilakukan nelayan setempat di Pangkalan Pendaratan Ikan:

1. Pabrik pembuatan Es Balok

Produksi es balok bagi nelayan sangatlah penting, karena pada saat melaut nelayan bisa sampai sehari-hari bahkan berminggu-minggu. Dengan adanya salah satu fasilitas pabrik pembuatan es balok yang ada di PPI ini setidaknya dapat memudahkan para nelayan untuk mendapatkan es dengan kualitas baik sehingga pada saat melaut para nelayan tidak khawatir akan hasil tangkapan yang busuk ketika pendaratan ikan.

b. Doking kapal/ Bengkel Kapal

Pada dasarnya bengkel kapal ini adalah tempat yang mumpuni untuk nelayan yang perlu memperbaiki kerusakan pada kapalnya, namun pada kenyataannya bengkel kapal disini tidak mempunyai alat ataupun fasilitas perbaikan kapal. Hanya saja disebut bengkel kapal karena biasanya para nelayan setelah



menurunkan hasil tangkapan nya lalu menyandarkan kapal di dermaga PPI untuk sekedar memperbaiki kapalnya secara individu.

c. Bongkar Muat Hasil Tangkapan

Meskipun secara umum masih banyaknya kekurangan fasilitas pada Pangkalan Pendaratan Ikan namun tidak sedikit nelayan yang masih memanfaatkan keberadaan pelabuhan yang ada di PPI tersebut untuk hanya sekedar menurunkan hasil tangkapan nya dikarenakan letak dermaga PPI yang dekat dengan kampung nelayan dan mayoritas nelayan yang melakukan bongkar muat di dermaga PPI ini hanya nelayan udang nenek.⁶⁴

Berdasarkan penelitian yang di lakukan peneliti di kampung Nelayan Kecamatan Nipah Panjang, secara kasat mata belum menunjukkan realisasi sebuah program yang benar-benar baik, hal tersebut dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana untuk para nelayan yang belum optimal dan menurut peneliti belum mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi para nelayan sebagaimana fungsinya.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Bapak Bujang selaku ketua Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Nipah Panjang, dalam pernyataan singkatnya beliau mengatakan bahwa:

“Pangkalan pendaratan ikan yang ada di Kecamatan Nipah Panjang menurut saya belum beroperasi sebagaimana fungsi sesungguhnya, karena banyak nelayan yang memilih membongkar hasil tangkapan nya di bangsal-bangsal mereka sendiri dan tidak mau mendaratkan kapalnya di PPI dengan berbagai alasan”⁶⁵

⁶⁴Observasi aktifitas nelayan di PPI Kecamatan Nipah Panjang, 17-21 November 2021

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Bujang S.H, ketua Pangkalan Pendaratan Ikan Kecamatan Nipah Panjang, 17-21 November 2021

Pernyataan tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Deffriany, S.Pi selaku kabid Pengelolaan Perikanan tangkap Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu kendala yang kami hadapi, Dinas Kelautan dan Perikanan adalah banyaknya nelayan yang tidak bertanggungjawab atau tidak mau mengikuti dan mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dari hal sepele yang dilakukan oleh nelayan seperti inilah yang nantinya akan menimbulkan dampak buruk bagi mereka sendiri salah satu contohnya adalah data yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan kadang tidak real dengan keadaan yang ada di lapangan karena banyaknya nelayan yang tidak mau menurunkan hasil tangkapan nya di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena itu pihak PPI juga akan kesulitan mengumpulkan data hasil tangkapan yang diperoleh nelayan setempat.”⁶⁶

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Deffriany, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Richard, ST selaku Kabid Penguatan dan daya Saing Produk Perikanan beliau mengatakan

“Kendala yang menghambat keberlangsungan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat pesisir terhadap sector perikanan tangkap yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini yang dimaksud adalah para pelaku yang melaksanakan program pemberdayaan dalam hal ini yang dimaksud adalah para masyarakat dalam penerapan pengelolaan modal, alat kerja maupun penangkapan. Keadaan sumber daya manusia khususnya masyarakat pesisir atau nelayan memang rata-rata masih rendah, karena kehidupan nelayan ini memang jarang yang mengenyam pendidikan tinggi, mereka kebanyakan tidak bersekolah, tamat Sekolah Dasar, SMP dan jarang sekali yang lulusan SMA, oleh karena itu dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi harus dilakukan dengan berbagai strategi. Oleh karena itu kemampuan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Syariah juga masih kurang karena memang keterbatasan sumber daya manusia”⁶⁷

Perkembangan masyarakat pesisir ini masih belum sebegus masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal itu bisa terlihat dengan belum tercukupinya fasilitas

⁶⁶Wawancara dengan Ibu Deffriany S.Pi, KABID Pengelolaan Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 10-14 November 2021

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Richard ST, selaku kabid Penguatan dan daya Saing Produk Perikanan, 16 november 2021

infrastruktur yang ada di wilayah pesisir dan juga pengetahuan, pemahaman tentang berbagai lembaga keuangan termasuk Koperasi yang memiliki peranan untuk membantu dibidang modal yang mereka butuhkan, serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir yang masih minim.

Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah setempat khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dijelaskan langsung oleh Ibu Deffriany, S.Pi selaku KABID Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:

1. Letak Geografis

Dengan kondisi dan rentang wilayah Kecamatan Nipah Panjang yang cukup jauh dari dari pusat kota Kabupaten hal ini sangat mempengaruhi mobilitas nelayan. Hal ini juga yang membuat banyak nelayan yang lebih memilih untuk menjual hasil tangkapannya di pasar-pasar terdekat bahkan terkadang mereka hanya menjual kepada tengkulak dan pengepul. Hal ini lah yang menjadi persoalan dimasyarakat karena pengepul hanya membeli hasil tangkapan yang menurutnya bagus dan bernilai ekonomis, sisanya para nelayan hanya memasarkan dengan harga rendah.

2. Kapal asing

Di laut yang luas dan sungai yang terhubung dengan daerah-daerah lain tidak bisa dipungkiri bahwasanya banyak kapal-kapal asing dari luar daerah yang juga ikut menangkap ikan di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, walaupun sudah ada aturan yang dibuat untuk mengatasi masalah kapal asing di daerah kita namun pada kenyataannya masih banyak kapal dari luar yang masuk, sebenarnya hal ini terjadi karena masih banyaknya oknum yang tidak



bertanggung jawab dengan tugasnya dan bahkan lebih parahnya ada nelayan dari luar daerah yang menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti trawl. Penggunaan trawl sebenarnya dilarang oleh pemerintah bahkan telah diatur dalam PERMEN No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) Dan Pukat Tarik (*Seinen Nets*) karena alat tangkap ini adalah alat tangkap yang dapat merusak ekosistem bawah laut.

3. Ilegal Fishing

Ilegal fishing adalah proses penangkapan ikan secara brutal atau proses penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, dalam hal ini tidak sedikit nelayan nakal yang masih melakukannya dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang banyak tanpa mereka pikirkan efek jangka panjang yang ditimbulkannya.

4. Kesadaran Masyarakat

Dengan jumlah nelayan yang cukup banyak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sulit rasanya untuk dapat menyamakan pemikiran, menumbuhkan kesadaran tentang betapa pentingnya menjaga ekosistem laut untuk kestabilan alam. Sebetulnya hal inilah yang menjadi PR paling rumit bagi setiap daerah.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama masyarakat pesisir yaitu nelayan karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat. Fakta tersebut cukup memprihatinkan, mengingat masyarakat nelayan dikenal sangat dekat dengan sumber daya hayati yang ada di laut. Namun dengan potensi kelautan dan perikanan yang selama ini ada, ternyata masih belum bisa mensejahterahkan masyarakat di kawasan pesisir.



Maka dari itu diperlukan pembinaan kelompok nelayan maupun kelompok lainnya sehingga terwujud sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sosial, politik, dan budaya agar mampu dan dapat menjangkau akses sumberdaya alam, permodalan, teknologi, dan pasar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun dilaut serta saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi besar wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan pesisir, oleh karena itu sangat perlu pemberdayaan.⁶⁸

⁶⁸Observasi di kampung nelayan di Kecamatan Nipah Panjang, 24-26 november 2021

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan di Kecamatan Nipah Panjang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai beberapa program yaitu:

1. Program bantuan perahu (pompong) sebanyak 2000 unit.
2. Program alat tangkap
3. Program PUMP (Pengembang Usaha Masyarakat Pesisir).
4. Program pembinaan masyarakat
5. Program asuransi nelayan
6. Program bantuan rumah subsidi

Dalam merealisasikan suatu program kerja tentunya tidak sedikit kendala yang terjadi dilapangan, demikian juga kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menerapkan program kerjanya guna meningkatkan kemajuan suatu daerah melalui sektor perikanan dan kelautan nya. Berikut adalah beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

1. Letak Geografis
2. Kapal asing
3. Iegal Fishing

4. Kesadaran Masyarakat

Untuk perealisasiannya secara umum program yang dibuat oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sudah berjalan dengan baik seperti pemberian bantuan dan sosialisasi sekaligus pembinaan, sedangkan untuk kendala yang dihadapi sampai saat ini dinas terkait masih berupaya untuk bagaimana memberikan jalan keluar yang baik.

B. SARAN

Berkaitan dengan pembahasan diatas mengenai Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Kecamatan Nipah Panjang maka ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan agar terus selalu konsisten dan berkelanjutan dalam upaya nya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan, melengkapi sarana maupun prasana atau fasilitas yang dibutuhkan nelayan khususnya nelayan yang taraf ekonominya masih dibawah rata-rata.
2. Kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Nipah Panjang agar dapat berkerja sama dengan pemerintah untuk selalu memanfaatkan bantuan serta fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan baik dan bijaksana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Public*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Denzim & Lincoln. *Handbook Of Qualitative Research*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-karim dan terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- Firyal Akbar & Widya Kurniati. *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo: Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Fermana, Suryana. *Kebijakan Public Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Hamirul & Alamsyahril. *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Public*. Malang: CV.Pustaka Learning Center, 2020.
- Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Public*. Yogyakarta: Gave Media, 2011.
- Hayat. Muhamad Nuh, dkk. *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Mikro*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Imron. *Pengembangan Ekonomi Nelayan Dan Sistem Sosial Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- K. Marrus. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur . *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Mulyana, Dedi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nugroho, Iwan. *Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Gedung Persada, 2009.
- Resmiati Sari, Puput Ratnasari, dkk. *Kualitas Pelayanan Pt Pos Indonesia Cabang BaritoSelatan*. Jurnal Administrasi Publik, 2020.
- Rangkuti, *Analisis Swot Tehnik Tehnik Analisis Membelah Kasus*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Syafiie, Inu kencana. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.



- Sayuti Una. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Jambi: Syariah press IAIN STS, 2014.
- Sayuti Una. *Tim Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Jambi, Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020
- Sukardi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gedung Persada, 2009.
- Supriyono. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Suryawasita. *Asas Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Karsinus, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharto, Edi. *Penerapan kebijakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Public*. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wahyu, Tri. *Tingkat kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik*. Universitas Jambi: Skripsi, 2012
- William n. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: PT. Jaga Karsa, 2001.

B. Karya Ilmiah

- Fauziah, Hera. *Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah*. JOM Fakultas Hukum: Vol 3, No 2, 2016.
- Helmi Alfian & Satria Arif. *Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologis*. Makara , Sosial Humaniora: Vol 16, No 1, 2012.
- Septina, Shinta. *System Social-Budya Pantai: Mata Pencarian Nelayan Dan Pengola Ikan Di Kelurahan Panggung*. SUPM Negeri Tegal: Vol 13, No 1, 2018
- Nadir, Sakinah. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Politik Profetik: Vol 1, No 1, 2013.
- A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, Leonard. Berry. *A Conceptual Model of Service Quality and Implication for Future Research*. Journal of Marketing: Vol 49, No 4, 2005.

C. Undang-Undang

Peraturan Menteri No 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawl*) dan Pukat tarik (*seinen nets*) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang *Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Public.*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan.*

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009, Tentang *Kesejahteraan Sosial.*

Undang-undang RI No 7 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2

Undang-Undang No 7 tahun 2016 Pasal 1 ayat 5

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*, pasal 18 ayat 1,2 dan 3

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2011 dan Statistik Perikanan Budi daya Indonesia, 2011.*

D. Website

<http://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur>.

<https://jambi.bps.go.id/indicator/12/1107/1/penduduk-menurut-wilayah-administrasi-dan-suku-bangsa.html>.



LAMPIRAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 1 Surat Bukti Riset

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PERIKANAN
 JL. Bahayangkara Kantor Bersama Lt.2
 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat
MUARA SABAK

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 523 / 299 / SKet / Diskan / 2022

Bersama dengan surat ini Dinas Perikanan Tanjung Jabung Timur menyatakan bahwa :

Nama : Arif Nofrianto
 NIM : 105170400
 Judul Proposal : Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan (Studi di Kecamatan Nipah Panjang).

Telah melaksanakan Proses Pengambilan Data di Dinas Perikanan Tanjung Jabung Timur. Demikian Surat Keterangan diberikan kepada mahasiswa diatas dalam rangka menyusun skripsi penelitian, atas perhatian kami ucapkan Terimakasih.

Ditetapkan di : Muara Sabak
 Pada Tanggal : 21 Juni 2022

ANALIS PERENCANAAN PROGRAM
DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR

PIERMAN, ST
 Penata Muda Tk I (III/ b)
 NIP. 197507232010010005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
 Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-5562 /D.II.1/PP.00.11/11/2021
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 08 November 2021

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Kelautan
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

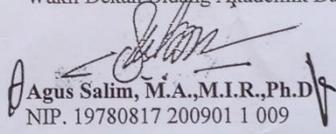
Nama : **Arif Nofrianto**
 NIM : 105170400
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Pemerintahan
 Tahun Akademik : 2021/2022
 Judul Skripsi : **Strategi Dinas Kelautan Perikanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Tradisional (Studi Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjabtim)**

Lokasi Penelitian : Kantor Dinas Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Waktu Penelitian : 08 November 2021 – 08 Februari 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan


Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
 NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Lampiran 2 Daftar Informan

Rancangan Informan

No	Unsur	Jumlah
1.	Kabid Kelautan dan Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur	1. Deffriyani, S.Pi
2.	Kabid Pengawasan Sumberdaya Perikanan	1. Richard R, S.T
3.	Seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran	1. Nina Mariningsih, S.Pi, MS
4.	Pengurus Organisasi Paguyuban Nelayan	1. Bujang, S.E 2.
5.	Nelayan	1. Bapak Razali 2. Bapak Tarsim 3. Bapak Usman 4. Ibu Heni 5. Ibu Fatimah 6. Bapak Jupriadi 7. Ibu Ayu 8. Bapak Poniran 9. Bapak Siti 10. Bapak Sarifudin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Camat Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - a. Apa saja fasilitas dan bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk nelayan tradisional?
 - b. Berapa anggaran untuk bantuan tersebut?
 - c. Apakah ada pelatihan khusus untuk meningkatkan perekonomian nelayan tradisional?
 - d. Apakah ada program-program yang di khususkan untuk nelayan tradisional?
 - e. Faktor apa saja yang menjadi hambatan di lapangan maupun dalam pelaksanaannya?
2. Pengurus Paguyuban Nelayan
 - a. Berapa jumlah anggotanya?
 - b. Bantuan dan fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk para nelayan?
 - c. Program apa saja yang telah diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk para nelayan?
3. Nelayan
 - a. Bantuan dan fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk para nelayan?
 - b. Berapa penghasilan tangkap ikan dalam satu kali melaut?
 - c. Apa saja keluhan dan masalah yang di hadapi oleh nelayan?



Observasi

1. Mengamati kegiatan nelayan tradisional di Kecamatan Nipah Panjang.
2. Mengikuti kegiatan dan proses penangkapan ikan para nelayan.
3. Mengamati hasil tangkapan yang diperoleh nelayan tradisional.
4. Mengamati sikap perilaku nelayan.
5. Mengamati tindakan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Mengamati keluhan para nelayan.
7. Mengamati keluhan para petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dokumentasi

1. Dokumentasi lokasi penelitian
2. Dokumentasi ketika peneliti wawancara dengan narasumber.



Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian

Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Kecamatan Nipah Panjang



Dokumentasi 25 November 2021

Wawancara dengan Ibu Deffriany S.Pi, KABID Pengelolaan Perikanan Tangkap di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Dokumentasi 10-14 November 2021

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Wawancara dengan Bapak Ricard R,ST, kabid pengawasan sumber daya perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Dokumentasi 10-14 November 2021

Wawancara dengan Bapak Bujang, SE selaku ketua Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur



Dokumentasi tanggal 25-26 November 2021

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Wawancara dengan Ibu Fatimah salah satu istri nelayan di Kecamatan Nipah

Panjang



Dokumentasi 25-26 November 2021

Wawancara dengan Bapak Razali selaku nelayan tradisional di Kecamatan Nipah

Panjang



Dokumentasi tanggal 25-26 November 2021

Daftar Riwayat Hidup



Data Pribadi

Nama : Arif Nofrianto

Tempat & Tgl.Lahir : Rantau Rasau, 26 November 1996

NIM : 105170400

Alamat : Sk. 23 Rt. 05 Desa Rantau Jaya, Kec. Rantau Rasau, Kab. Tanjung Jabung Timur

E-mail : arifnofrianto2611@gmail.com

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Wasis

Nama Ibu : Sulastri

Riwayat Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SDN 46/X Rantau Jaya

Tahun 2011-2013 : SMPN 2 Rantau Rasau

Tahun 2013-2015 : SMAN 1 Tanjung Jabung Timur

Tahun 2017- Sekarang : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi